

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS DIGITAL DI KOTA PALANGKA RAYA

Alia Friskila

friskilaalia@gmail.com

Sriafni Y Siburian

Sriafnisiburian001@gmail.com

Elya Amaliah

elyaamaliah2005@gmail.com

Pebrita Simbolon

pebritasimbolon@gmail.com

Marsya septriana

Marsyaseptriana@gmail.com

Purada Riska Uli Lumban Raja

puradanainggolan83@gmail.com

Rice Widianingsih

icewidia025@gmail.com

Fendy Hariatama H

fendyhariatama@fkip.upr.ac.id

Grace Evelina Buji, S.E., M. S.i

graceevelina@fkip.upr.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of digitally-based regional financial management in Palangka Raya City, evaluating the extent to which digital transformation affects fiscal governance, regional autonomy, and the quality of public services. Employing a qualitative case study approach, the method included analysis of secondary APBD data (2021-2024), in-depth interviews with local government officials (BPKAD, Bapenda, TP2DD), and documentation studies. The findings indicate that the implementation of the Regional Government Electronic Transactions (ETPD) policy has successfully served as a key instrument for enhancing efficiency and transparency in financial management. ETPD significantly strengthens the Internal Control System (ICS) and accelerates bookkeeping and reporting cycles. However, Palangka Raya City's fiscal performance is still shadowed by a heavy dependence on central transfer funds and the domination of employee expenditure, which hinders productive digital investment allocations. The main challenges identified are non-technical, including limited Human Resources (HR) capacity among officials to operate complex systems and uneven digital infrastructure in peripheral areas. Furthermore, community participation in budget oversight (horizontal accountability) requires improvement. This study recommends the optimization of Local Own-Source Revenue (PAD) through the expansion of ETPD into strategic local economic sectors, such as tourism and MSMEs, along with massive HR capacity building, as key measures to realize effective, accountable, and sustainable digital financial governance.

Keywords: *Regional Financial Management; Digitalization; ETPD; Transparency; Fiscal Dependence; Palangka Raya City.*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi digital telah menjadi katalisator utama dalam reformasi sektor publik di Indonesia, khususnya dalam konteks pengelolaan keuangan daerah. Dalam era otonomi dan tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), pemerintah daerah

diwajibkan mewujudkan proses keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien (UU No. 17 Tahun 2003). Transformasi digital menjadi solusi strategis untuk mengatasi tantangan klasik administrasi publik, seperti inefisiensi birokrasi yang berbasis manual dan potensi kebocoran anggaran, dengan mendorong sistem yang lebih efisien dan berbasis digital (Tria & Falihutun, 2024).

Pemerintah pusat melalui kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) secara aktif mendorong perubahan transaksi penerimaan dan pengeluaran dari tunai menjadi non-tunai. ETPD tidak hanya bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas fiskal, tetapi juga untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Implementasi ETPD ini merupakan langkah nyata adopsi *New Public Management (NPM)* di Indonesia, yang menitikberatkan pada efisiensi dan pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

Kota Palangka Raya, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, telah menunjukkan komitmen kuat dalam digitalisasi keuangannya, yang dibuktikan melalui berbagai inovasi seperti integrasi sistem informasi dan layanan pembayaran pajak/retribusi non-tunai. Namun, meskipun digitalisasi sistem telah berjalan, gap penelitian (research gap) dan masalah struktural masih terlihat:

1. Isu Ketergantungan Fiskal dan Efisiensi Anggaran: Data menunjukkan Kota Palangka Raya masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat dan menghadapi dominasi belanja pegawai dalam APBD. Hal ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana efisiensi yang dihasilkan oleh digitalisasi mampu membebaskan ruang fiskal untuk belanja pembangunan yang lebih produktif.
2. Isu Kesiapan SDM dan Infrastruktur: Efektivitas sistem digital sangat dipengaruhi oleh kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur. Di tengah keterbatasan kompetensi teknologi dan infrastruktur yang belum merata, potensi optimalisasi ETPD dan sistem lainnya dapat terhambat.

Berdasarkan latar belakang, tantangan, dan *gap* empiris tersebut, penelitian ini memiliki tujuan utama untuk menganalisis efektivitas implementasi pengelolaan keuangan daerah berbasis digital di Kota Palangka Raya, mengevaluasi dampak digitalisasi terhadap peningkatan PAD, serta mengidentifikasi tantangan dan implikasinya terhadap struktur belanja daerah.

Kontribusi Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi Teoritis: Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya literatur akuntansi sektor publik dan keuangan daerah, khususnya dalam menguji relevansi teori *Good Governance* dan *NPM* di tengah konteks transformasi digital pada pemerintah daerah.
2. Kontribusi Praktis: Hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi strategis bagi Pemerintah Kota Palangka Raya dalam merumuskan kebijakan yang berfokus pada peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi PAD, dan alokasi belanja yang lebih produktif, sehingga tata kelola keuangan digital dapat secara berkelanjutan mendukung pembangunan daerah.

LANDASAN TEORI

Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Pilar Tata Kelola Pemerintahan

Pengelolaan keuangan daerah (PKD) adalah serangkaian aktivitas yang meliputi perencanaan hingga pertanggungjawaban keuangan, dengan tujuan utama memastikan sumber daya publik digunakan secara efisien, efektif, dan akuntabel (PP No. 12 Tahun 2019). Dalam konteks otonomi, penerapan PKD harus berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), yang meliputi akuntabilitas dan transparansi (Pangaribuan & Situmorang, 2024).

Akuntabilitas menuntut pemerintah daerah (pemegang amanah) untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran kepada publik dan otoritas yang lebih

tinggi. Semakin tinggi tingkat akuntabilitas dalam pelaporan dan pelaksanaan, semakin baik pula kinerja pemerintah daerah (Mikael Edowai, 2021). Sementara itu, Transparansi adalah keterbukaan informasi keuangan, yang membantu membangun kepercayaan masyarakat dan memfasilitasi pengawasan publik terhadap penggunaan APBD (Judijanto et al., 2024). Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah (Pangaribuan & Situmorang, 2024). Namun, efektivitas pencapaian pilar ini sangat bergantung pada sistem pendukung, terutama Sistem Pengendalian Internal (SPI). Penelitian oleh Sari, Mulyani, & Budiarto (2020) menekankan bahwa penguatan SPI sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Digitalisasi, Transformasi Birokrasi, dan Kualitas Laporan Keuangan

Transformasi digital dalam sektor publik adalah keharusan, bukan pilihan, guna memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan (Wirtz et al., 2020 dalam Indriyani & Mappanyukki, 2022). Digitalisasi birokrasi bertujuan untuk mengatasi inefisiensi dan prosedur manual yang lambat. Digitalisasi pengelolaan keuangan daerah membawa dampak signifikan pada kualitas laporan keuangan dan efisiensi administrasi:

1. Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI): Penerapan TI yang optimal, seperti Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), terbukti meningkatkan akurasi, efisiensi, dan keterbukaan informasi keuangan (Syairozi et al., 2021). Pemanfaatan TI ini juga merupakan variabel kunci yang berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan (Binawati & Nindyaningsih, 2022).
2. Efisiensi Anggaran: Digitalisasi memotong rantai birokrasi dan memungkinkan otomatisasi, sehingga secara langsung berkontribusi pada efisiensi anggaran dengan

- mengurangi penggunaan dokumen fisik dan mempercepat siklus pelaporan (Aw, 2024).
3. Pengendalian Internal: Dengan digitalisasi dan otomatisasi sistem, SPI siklus pelaporan dapat diterapkan lebih mudah dan lebih efektif dalam menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan akuntabel (Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, 2024).

Meskipun manfaatnya besar, keberhasilan transformasi digital sering terhambat oleh resistensi terhadap keterbukaan, minimnya tenaga ahli, dan keterbatasan infrastruktur teknologi (Harahap, 2022).

Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan Optimalisasi Pendapatan

Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) adalah implementasi konkret dari digitalisasi di sektor keuangan daerah. ETPD mewajibkan perubahan dari transaksi penerimaan dan pengeluaran tunai ke non-tunai (Bank Indonesia, 2018).

Tujuan ETPD adalah ganda: memperkuat akuntabilitas fiskal dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada sisi pendapatan, kemudahan pembayaran pajak dan retribusi melalui kanal digital (*mobile banking, e-commerce, QRIS*) secara langsung meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperluas basis pendapatan daerah. Penelitian menunjukkan bahwa daerah yang menerapkan sistem administrasi digital secara menyeluruh cenderung memiliki kinerja pengelolaan APBD yang lebih akuntabel dan efisien, termasuk dalam realisasi PAD (Pratama et al, 2021).

Keberhasilan ETPD, dan pengelolaan keuangan digital secara umum, sangat bergantung pada langkah strategis pemerintah daerah dalam mengatasi kendala SDM dan infrastruktur. Tantangan ini menjadi fokus utama dalam konteks Kota Palangka Raya, di mana optimalisasi PAD harus dilakukan di tengah ketergantungan pada dana transfer dan dominasi belanja pegawai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus (*case study*). Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi yang mendalam dan holistik terhadap konteks dan proses pengelolaan keuangan daerah berbasis digital di Kota Palangka Raya. Pendekatan studi kasus bertujuan untuk memahami fenomena kontemporer (digitalisasi) dalam konteks kehidupan nyata, khususnya mengenai efektivitas implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan struktur belanja.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah kebijakan, sistem, dan praktik pengelolaan keuangan daerah Kota Palangka Raya, dengan fokus pada periode anggaran 2021 hingga 2024.

Fokus dan Sumber Data Penelitian

Sumber Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan para informan kunci (*key informant*). Pemilihan informan didasarkan pada teknik *purposive sampling*, yaitu pihak-pihak yang memiliki pengetahuan mendalam dan terlibat langsung dalam perumusan kebijakan dan implementasi sistem keuangan daerah digital. Informan meliputi:

1. Pejabat/Staf Teknis pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), khususnya bidang yang mengelola sistem digital dan PAD.
2. Perwakilan dari Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), termasuk dari Bank Indonesia atau Bank Pembangunan Daerah.
3. Pejabat pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang terlibat dalam elektronifikasi penerimaan pajak dan retribusi.

Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif berupa dokumen resmi dan arsip, meliputi:

1. Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya (termasuk Perda dan Perwali) tahun 2021–2024.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
3. Dokumen kebijakan terkait ETPD dan digitalisasi pelayanan publik.

Teknik Pengumpulan Data

Tiga teknik utama digunakan untuk mengumpulkan data:

1. Wawancara Mendalam: Dilakukan secara terstruktur dan semi-terstruktur untuk menggali persepsi, tantangan, dan strategi yang diterapkan oleh pemerintah daerah terkait digitalisasi. Wawancara bertujuan untuk memahami konteks di balik angka-angka dan kebijakan yang tertulis.
2. Analisis Data Sekunder: Melibatkan pengumpulan, kompilasi, dan rekapitulasi data keuangan dari APBD, khususnya data realisasi PAD, dana transfer, belanja pegawai, dan belanja modal untuk periode 2021-2024. Data ini digunakan untuk memetakan kondisi fiskal daerah.
3. Studi Dokumentasi: Pengumpulan dokumen-dokumen resmi (peraturan, laporan, *Standard Operating Procedure/SOP*) yang digunakan sebagai basis legalitas dan operasional sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis digital.

Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis data kualitatif interaktif model Miles dan Huberman (1994), yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang saling berhubungan:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*): Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumen. Fokus diarahkan pada isu digitalisasi, efisiensi anggaran, dan optimalisasi PAD.
2. Penyajian Data (*Data Display*): Penataan informasi yang terorganisir dan terkompresi dalam bentuk narasi, matriks, atau *flowchart* untuk memungkinkan penarikan kesimpulan. Data sekunder (APBD) disajikan dalam tabel komparatif untuk menunjukkan tren PAD dan alokasi belanja.
3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*): Penarikan kesimpulan akhir yang dilakukan secara bertahap sepanjang penelitian, bukan hanya di akhir. Kesimpulan diverifikasi melalui perbandingan temuan wawancara dengan data dokumentasi (triangulasi).

Melalui teknik analisis ini, penelitian bertujuan menghasilkan interpretasi mendalam mengenai efektivitas dan implikasi kebijakan digitalisasi terhadap tata kelola keuangan daerah di Kota Palangka Raya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Kinerja Fiskal Daerah dan Dilema Desentralisasi

Studi kasus Kota Palangka Raya dalam pengelolaan keuangan daerah dihadapkan pada dilema fundamental desentralisasi fiskal: kewenangan besar dalam pengelolaan, namun sumber daya yang terbatas. Analisis data sekunder APBD periode 2021–2024

menggarisbawahi tantangan struktural yang menjadi latar belakang mendesaknya implementasi sistem berbasis digital.

a. Dominasi Transfer Pusat dan Rasio Kemandirian Fiskal

Data menunjukkan bahwa total pendapatan Kota Palangka Raya masih sangat didominasi oleh Dana Transfer Pusat, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah berada di atas 80%, sebuah indikator bahwa kota ini belum mampu berdiri mandiri dalam membiayai belanja wajibnya.

Menurut Yuliati (2001), kemandirian keuangan daerah adalah prasyarat keberhasilan otonomi. Ketergantungan yang tinggi ini memposisikan Kota Palangka Raya sebagai daerah yang rentan terhadap fluktuasi kebijakan fiskal pusat, sehingga membatasi kemampuan pemerintah daerah untuk merencanakan program pembangunan jangka panjang yang inovatif. Oleh karena itu, digitalisasi menjadi strategis: bukan hanya tentang efisiensi administrasi, tetapi tentang menciptakan stabilitas fiskal melalui PAD yang berkelanjutan.

b. Kesenjangan Alokasi Belanja: Beban Rutin vs. Inovasi Digital

Tantangan fiskal diperburuk oleh struktur belanja daerah. Analisis APBD mengungkapkan bahwa Belanja Pegawai (belanja rutin) mengonsumsi porsi yang sangat besar, mencapai rata-rata 40%–50% dari total belanja. Dominasi belanja rutin ini secara dramatis menekan ruang fiskal (*fiscal space*) yang dapat dialokasikan untuk belanja modal dan program pembangunan yang bersifat produktif.

Dalam konteks digitalisasi, penekanan belanja rutin memiliki implikasi serius. Belanja untuk infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pengembangan sistem ETPD, dan pelatihan SDM—yang merupakan investasi modal penting—menjadi terhambat. Jika dana transfer hanya habis terserap oleh belanja rutin, maka inovasi digital yang diamanatkan pusat

akan sulit terimplementasi secara optimal karena kurangnya dukungan alokasi anggaran yang memadai untuk pemeliharaan dan *upgrade* sistem.

2. Efektivitas ETPD dan Transformasi Tata Kelola Digital (*Arial 11pt, Title Case, Bold, Rata Kiri*)

Pemerintah Kota Palangka Raya telah menjadikan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebagai kebijakan inti dalam transformasi digital, sejalan dengan inisiatif Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Analisis studi kasus menunjukkan bahwa dampak ETPD paling signifikan terasa pada perbaikan kualitas tata kelola.

a. ETPD sebagai Pendorong Transparansi dan Akuntabilitas

Dampak ETPD terhadap transparansi dan akuntabilitas adalah hal yang paling menonjol. Perubahan dari transaksi berbasis tunai menjadi non-tunai menciptakan *audit trail* digital yang tidak bisa dihapus. Proses ini meminimalkan interaksi manusia dengan kas fisik, yang secara otomatis memperkuat Sistem Pengendalian Internal (SPI).

Seorang informan kunci dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menegaskan, “*Sistem non-tunai menghilangkan peluang kebocoran dana yang sering terjadi pada transaksi manual. Setiap penerimaan dari pajak atau retribusi langsung masuk ke rekening kas daerah, dan setiap pengeluaran tercatat dengan detail. Ini adalah fondasi dari akuntabilitas publik yang sesungguhnya.*”

Temuan ini sangat relevan dengan teori *Good Governance* (Mardiasmo, 2002), di mana transparansi adalah kunci pencegahan korupsi. ETPD memastikan transparansi proses *input* dan *output* keuangan, meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dihasilkan.

b. Peningkatan Efisiensi pada Siklus Pengeluaran

Di sisi belanja, implementasi transaksi non-tunai (SP2D Non-Tunai) dan penggunaan sistem terintegrasi (SIPD) telah mempersingkat siklus penatausahaan dan pembayaran. Waktu yang diperlukan untuk proses birokrasi, yang dulunya memakan waktu berhari-hari karena proses validasi manual dan tandatangan berjenjang, kini dapat diselesaikan dalam hitungan jam.

Peningkatan efisiensi ini mendukung pandangan dalam literasi manajemen publik bahwa adopsi teknologi berbasis *New Public Management* (NPM) dapat mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan kecepatan layanan (Turtiantoro, 2000). Percepatan ini membebaskan aparatur dari tugas administrasi rutin, memungkinkan mereka untuk berfokus pada analisis dan perencanaan strategis.

3. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Perluasan Basis Ekonomi Digital

Meskipun ETPD berhasil meningkatkan kualitas tata kelola, tantangan sesungguhnya di Kota Palangka Raya adalah mentransformasikan perbaikan tata kelola ini menjadi peningkatan kuantitatif pada PAD untuk mengurangi ketergantungan fiskal.

a. ETPD sebagai Katalis Kepatuhan Wajib Pajak

Pada sektor penerimaan, ETPD telah menjadi katalis bagi peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi. Kemudahan akses pembayaran melalui berbagai kanal digital (QRIS, *e-banking*, *virtual account*) telah meminimalkan alasan wajib pajak untuk terlambat atau menghindari pembayaran.

Namun, data realisasi PAD menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan nominal, laju pertumbuhan PAD belum cukup untuk secara signifikan mengimbangi laju pertumbuhan total belanja daerah yang bersifat rutin. Hal ini menyiratkan bahwa masalahnya bukan hanya pada *kepatuhan*, tetapi pada basis pajak dan potensi ekonomi yang belum sepenuhnya tergarap.

b. Strategi Perluasan Basis Pajak Melalui Sektor UMKM dan Pariwisata

Penelitian ini secara eksplisit merekomendasikan optimalisasi potensi ekonomi lokal seperti sektor Pariwisata dan UMKM sebagai langkah strategis digitalisasi lanjutan. Sektor UMKM adalah tulang punggung perekonomian lokal, dan integrasi digital mereka ke dalam sistem penerimaan daerah akan memperluas basis pajak dan retribusi secara signifikan.

Penggunaan ETPD harus diperluas untuk mencakup pemungutan retribusi pariwisata dan transaksi UMKM. Strategi ini sejalan dengan penelitian yang membahas pentingnya digitalisasi untuk penyelamatan informasi dan perluasan cakupan administrasi, seperti yang disarankan oleh Dienillah & Dewi (2018). Dengan mendorong UMKM bertransaksi non-tunai, pemerintah tidak hanya meningkatkan efisiensi UMKM tetapi juga secara *implisit* meningkatkan *tax coverage* tanpa harus menaikkan tarif pajak.

4. Analisis Kritis Terhadap Hambatan Non-Teknis Digitalisasi

Efektivitas pengelolaan keuangan berbasis digital di Kota Palangka Raya sangat dipengaruhi oleh tiga hambatan non-teknis yang bersifat strategis dan struktural.

a. Kesenjangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Kendala utama yang ditemukan adalah kualitas dan kompetensi SDM yang mengoperasikan sistem tersebut. Hasil wawancara menegaskan bahwa investasi pada perangkat keras dan lunak tidak diimbangi dengan investasi yang setara pada modal manusia.

Banyak aparatur, terutama di tingkat pelaksana teknis, masih memiliki literasi digital yang rendah dan cenderung resisten terhadap perubahan budaya kerja yang dituntut oleh sistem digital. Kurangnya kompetensi ini berdampak langsung pada kualitas laporan keuangan (Defitri, 2018). Jika data yang diinput oleh aparatur tidak akurat atau terlambat, maka meskipun sistemnya canggih, *output* laporan keuangan yang dihasilkan akan rendah kualitasnya.

Peningkatan kapasitas SDM harus menjadi prioritas utama. Ini bukan hanya tentang pelatihan teknis, tetapi juga tentang pengelolaan perubahan (*change management*) untuk menanamkan *mindset* akuntabel, transparan, dan efisien yang didorong oleh teknologi.

b. Tantangan Pemerataan Infrastruktur dan *Digital Divide*

Kota Palangka Raya, yang memiliki wilayah geografis yang luas, menghadapi tantangan pemerataan infrastruktur TIK. Meskipun sistem telah dipusatkan, implementasi ETPD di unit-unit layanan yang berlokasi di wilayah pinggiran atau yang memiliki akses internet terbatas menjadi terhambat.

Kesenjangan infrastruktur ini menciptakan kesenjangan digital (*digital divide*) dalam pelayanan publik. Efisiensi ETPD hanya dinikmati oleh unit-unit yang berada di pusat kota, sementara masyarakat atau unit kerja di daerah terpencil masih harus bergantung pada mekanisme manual, yang secara fundamental menghambat tujuan pemerataan layanan publik digital.

c. Akuntabilitas Horizontal dan Partisipasi Masyarakat

Digitalisasi telah berhasil mencapai akuntabilitas vertikal (pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi melalui laporan), tetapi akuntabilitas horizontal (pertanggungjawaban kepada masyarakat) masih memerlukan penguatan.

Meskipun APBD dan laporan keuangan kini tersedia secara *online* (transparan), partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan perencanaan anggaran belum optimal. Hal ini disebabkan oleh: (1) Kompleksitas data keuangan yang disajikan, yang sulit dipahami oleh masyarakat awam; dan (2) Kurangnya mekanisme *feedback* yang aktif dan mudah diakses oleh publik.

Untuk mengoptimalkan akuntabilitas horizontal, pemerintah daerah harus beralih dari sekadar keterbukaan data menjadi fasilitasi partisipasi. Hal ini dapat dilakukan melalui visualisasi data

anggaran yang interaktif dan *platform* konsultasi publik yang *user-friendly*, sehingga masyarakat merasa terlibat dan hasil pengawasan mereka diperhatikan.

5. Sintesis dan Interpretasi Temuan Kunci (Arial 11pt, Title Case, Bold, Rata Kiri)

Analisis pengelolaan keuangan daerah berbasis digital di Kota Palangka Raya dapat disimpulkan sebagai sebuah proses yang berada di tahap transisi. Kota ini telah berhasil mengadopsi kerangka teknologi yang diperlukan (ETPD dan sistem terintegrasi) dan mencapai perbaikan kualitas tata kelola (efisiensi dan transparansi). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Anda yang mengonfirmasi bahwa digitalisasi telah meningkatkan efisiensi dan transparansi.

Namun, efektivitas pengelolaan keuangan digital belum optimal karena terhambat oleh masalah struktural yang bersifat fiskal (ketergantungan dan dominasi belanja pegawai) dan masalah operasional yang bersifat non-teknis (keterbatasan SDM dan infrastruktur yang tidak merata).

Untuk mewujudkan tujuan akhir digitalisasi—yaitu pengelolaan keuangan yang akuntabel, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat—Kota Palangka Raya harus mengalihkan fokus dari pengadaan sistem ke penguatan ekosistem digital. Penguatan ini mencakup: (1) Peningkatan investasi pada SDM, (2) Strategi agresif untuk perluasan basis PAD di sektor ekonomi digital, dan (3) Peningkatan akuntabilitas horizontal melalui pelibatan publik. Langkah-langkah strategis ini akan menjadikan Kota Palangka Raya sebagai contoh keberhasilan tata kelola keuangan digital yang efektif.

SIMPULAN

Penelitian ini menganalisis efektivitas pengelolaan keuangan daerah berbasis digital di Kota Palangka Raya melalui studi kasus. Hasilnya menunjukkan bahwa digitalisasi telah sukses sebagai instrumen untuk meningkatkan tata kelola (*Good Governance*). Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) terbukti meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi keuangan, memperkuat Sistem Pengendalian Internal (SPI), dan meningkatkan akuntabilitas publik.

Meskipun demikian, digitalisasi belum optimal dalam memecahkan masalah struktural fiskal. Kota Palangka Raya masih menghadapi ketergantungan tinggi pada dana transfer pusat dan dominasi belanja pegawai yang menekan ruang fiskal untuk investasi TIK.

Tantangan utama yang dihadapi bersifat non-teknis, yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dalam mengoperasikan sistem yang kompleks dan infrastruktur digital yang belum merata. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan anggaran (*akuntabilitas horizontal*) masih perlu didorong.

Untuk keberlanjutan, direkomendasikan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui perluasan ETPD ke sektor potensial seperti Pariwisata dan UMKM, serta peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan. Dengan mengatasi kendala non-teknis ini, pengelolaan keuangan digital di Kota Palangka Raya akan berjalan lebih efektif dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aw, M. K. (2024). Peluang dan Tantangan dalam Efisiensi Anggaran Negara pada Transformasi Digital Pelayanan Publik. *Jurnal Konstitusi*.
- Bank Indonesia. (2018). *Cetak Biru Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Harahap, D. (2022). Penilaian Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Lokal*, 7(1), 1-15.

- Indriyani, E. F., & Mappanyukki, R. (2022). Transformasi Digital dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah. *Prosiding Konferensi Nasional Administrasi*, 148-160.
- Judijanto, L. H., Wahyuni, E. F., & Juliansyah, I. (2024). Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Laporan Keuangan di Era Digital. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 4(1), 32-45.
- Kardina, M., Frinaldi, A., Asnil, A., & Putri, N. E. (2024). Penilaian Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Di Indonesia. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 11(2), 615-620.
- Owner: Riset & Jurnal Akuntansi. (2024). Analisis Pengendalian Internal atas Siklus Pelaporan pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(3), 225-236.
- Pangaribuan, D., & Situmorang, M. (2024). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintahan. *Jurnal LABEL*, 2(1), 318-329.
- Pratama, I. G. B. G., Wirama, D. G., & Astika, I. B. P. (2021). Efektivitas Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*.
- Sari, R. P., Mulyani, C. S., & Budiarto, D. S. (2020). Pentingnya Pengendalian Internal Untuk Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 6(1), 1-15.
- Syairozi, I., Nurhayati, A., & Adiningtyas, E. P. (2021). Digital Transformation in Local Government: Enhancing Financial Transparency Through the Regional Financial Information System (SIKD). *Jurnal HEI EMA*, 4(1), 58-70.
- Tria, D. N., & Falihatun, M. (2024). Transformasi Teknologi Dalam Birokrasi: Analisis Dampak Digitalisasi Terhadap Efisiensi Birokrasi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik*, 10(2), 145–160.